

Judul : Kemarau panjang di 2026, waspada potensi bencana kekeringan
Tanggal : Minggu, 08 Maret 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Kemarau Panjang Di 2026 Waspada Potensi Bencana Kekeringan

FOTO: IG PERBADI



Sofwan Dedy

ANGGOTA Komisi V DPR Sofwan Dedy Ardyanto meminta Pemerintah mewaspada ancaman musim kemarau pada tahun 2026 yang akan lebih panjang dan lebih panas. Peringatan musim kemarau itu sudah diumumkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Sofwan minta ada panduan umum dalam menyusun perencanaan langkah-langkah mitigasi atau cara untuk mengurangi dampak bencana. "Ini bukan alarm biasa, tapi alarm serius yang tidak bisa ditanggapi secara normatif dan dimitigasi dengan pendekatan normal," ujarnya, kemarin.

Diketahui, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan, musim kemarau diprediksi terjadi mulai bulan April 2026. Musim panas akan dimulai di wilayah Nusa Tenggara dan akan bergerak ke barat secara bertahap ke wilayah Indonesia lainnya. "Puncak musim kemarau akan terjadi pada Agustus dan akan lebih panjang dari biasanya," ucapnya di Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Sofwan melanjutkan, ilmuwan cuaca dunia pernah merilis temuan El-Nino di sepanjang tahun 2026 akan mendorong suhu bumi naik menembus rekor terpanas sepanjang sejarah. Artinya, Bumi akan mulai panas ekstrem pada akhir 2026, dan akan berlanjut hingga awal 2027.

Untuk menyikapi alarm BMKG tersebut, Sofwan meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) khususnya Direk-

torat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air perlu meninjau kembali prioritas programnya di tahun anggaran 2026. "Apakah sudah berorientasi pada mitigasi tanggap bencana kekeringan, seperti alarm BMKG tersebut?" tanya dia.

Dia menjelaskan dalam Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (SDA) telah mengatur pengelolaan sumber daya air, termasuk di dalamnya pengendalian daya rusak air (termasuk kekeringan) untuk menjamin kebutuhan pokok rakyat.

Juga, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 37 tahun 2023 sudah mengatur secara lebih lugas tentang kebijakan nasional sumber daya air tentang peningkatan konservasi dan pengendalian risiko terkait air, termasuk di dalamnya tentang bencana kekeringan.

Da mengingatkan Ditjen Sumber Daya Air agar lebih awal melakukan perencanaan dan mitigasi potensi bencana kekeringan tahun 2026. Paling tidak ada empat langkah mitigasi yang perlu diperkuat. Pertama, memperbanyak program pembuatan sumur bor baru, operasi pemeliharaan sumur bor yang sudah menurun kinerjanya, dan merehabilitasi sumur bor lama di wilayah yang diprediksi berpotensi paling terdampak.

Kedua, fokus pada program/kegiatan yang bisa mengoptimalkan fungsi tampungan air pada bendungan, situ, embung, dan danau. Ketiga, mengantisipasi kekeringan lahan pertanian, Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai (BBWS/BWS) untuk lebih peka terhadap daerahnya. Caranya, dengan terus memonitor bendungan dengan melihat data BMKG setiap waktu.

Keempat, meninjau kembali lokus atau tempat program intruksi presiden (Inpres) Irigasi. "Apakah lokasi yang akan dioptimalisasi pada tahun 2026 sudah mempertimbangkan alarm dari BMKG," kata politikus PDIP ini. ■ TIF